



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Merpati, Remu, Sorong, Kompleks Perkantoran Walikota Sorong

Sorong, 26 Agustus 2026

Nomor : 000.8.3/242/UND-PBD/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan

Yth. **Daftar Undangan Terlampir**

Di -

Tempat

Dalam rangka meningkatkan capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar tidak masuk dalam kategori rendah dalam penerapan dan pelaksanaan SPM di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, maka Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bekerjasama dengan SKALA akan melaksanakan kegiatan pendampingan teknis bagi Tim Penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan SK Perubahan target 2026, SK Target SPM tahun 2027, pendampingan tentang tata cara melakukan verifikasi serta penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Aksi SPM tahun 2025-2029. yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa 01 September 2026 s.d. Kamis 03 September 2026
Waktu : 08.00 WIT - selesai
Tempat : Rylich Panorama Hotel Sorong

Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud diharapkan kepada Bapak/Ibu pimpinan OPD pengampu SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat menugaskan 1 (satu) orang admin SPM (*daftar peserta terlampir dalam KAK*) untuk hadir pada kegiatan tersebut.

Demikian disampaikan, atas Perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

An **GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA**
Pj SEKRETARIS DAERAH

Drs. YAKOB KARETH., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196708041988 199810 1 001

Tembusan Gubernur Papua Barat Daya

Lampiran Undangan

Nomor : 000.8.3/242/UND-PBD/2026

Tanggal : 26 Agustus 2026

1. Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Papua Barat Daya
2. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Barat Daya
3. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Barat Daya
4. Plt. Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya
6. Kepala Dinas Kesehatan dan PPKB Provinsi Papua Barat Daya
7. Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Barat Daya
8. Kepala Dinas Sosial dan P3A Provinsi Papua Barat Daya
9. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat Daya
10. Kepala Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesra Setda Papua Barat Daya.
11. Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Barat Daya.
12. Kepala Bapeda/Baperlitbang Kabupaten/Kota
13. Kepala Inspektorat Kabupaten/Kota
14. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota
15. Kepala Dinas Kesehatan dan PPKB Kabupaten/Kota
16. Kepala Dinas PUPR Kabupaten/Kota
17. Kepala Dinas Sosial dan P3A Kabupaten/Kota
18. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
19. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota
20. Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota
21. Tim SKALA

Kerangka Acuan Kegiatan (TOR)

Workshop Penguatan Peran Korbinwas Tim Penerapan SPM Provinsi Papua Barat Daya Sorong, 1-3 September 2026

1. LATAR BELAKANG

Penyediaan pelayanan dasar guna memenuhi hak kebutuhan mendasar setiap warga negara tanpa terkecuali merupakan kewajiban prinsipnya yaitu adanya kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, ketepatan sasaran, keterukuran dan kesinambungan. Melalui strategi perbaikan pelayanan dasar pemerintah maka ditetapkan standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam menyediakan pelayanan paling mendasar bagi Masyarakat. Implementasi pelayanan dasar melalui SPM ini telah diakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2025-2029) terbit Perpes no.12 tahun 2025 dirumuskan Upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam tahun 1 RPJPN tahun 2025-2045 dan merupakan bagian tidak terpisahkan sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia emas 2045. Dalam RPJMN 2024-2029 Prioritas Nasional 7, program prioritas 9 Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang cantumkan lebih lanjut di indikator PP yaitu Indeks Penerapan SPM.

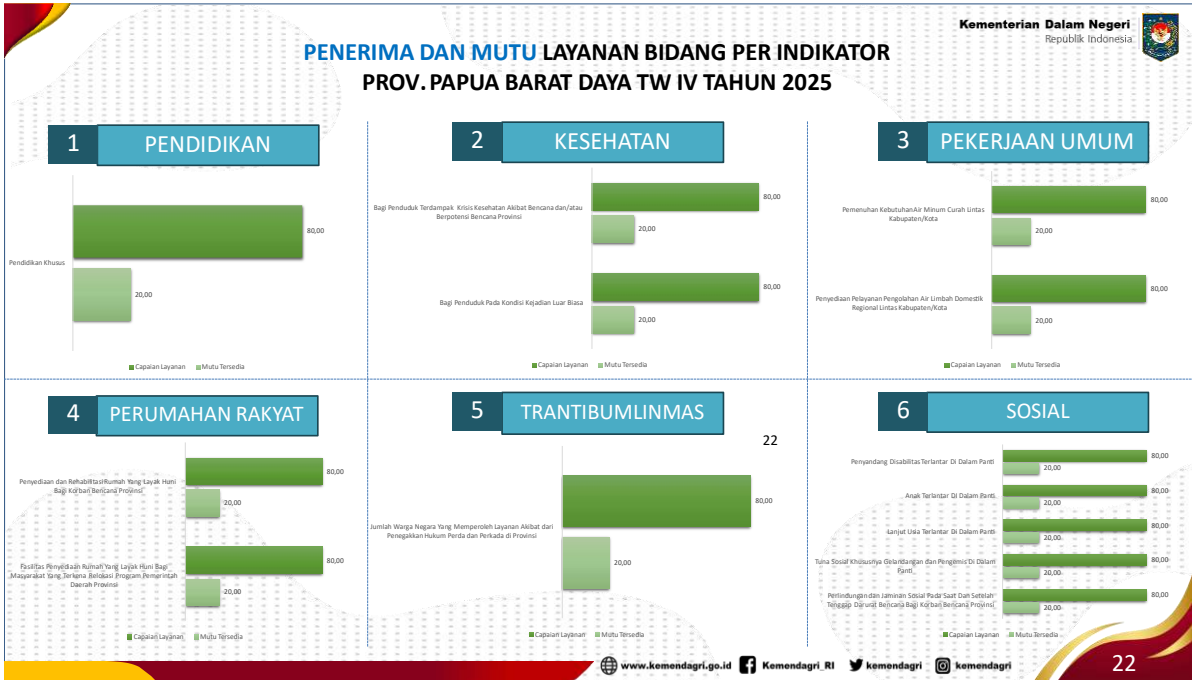
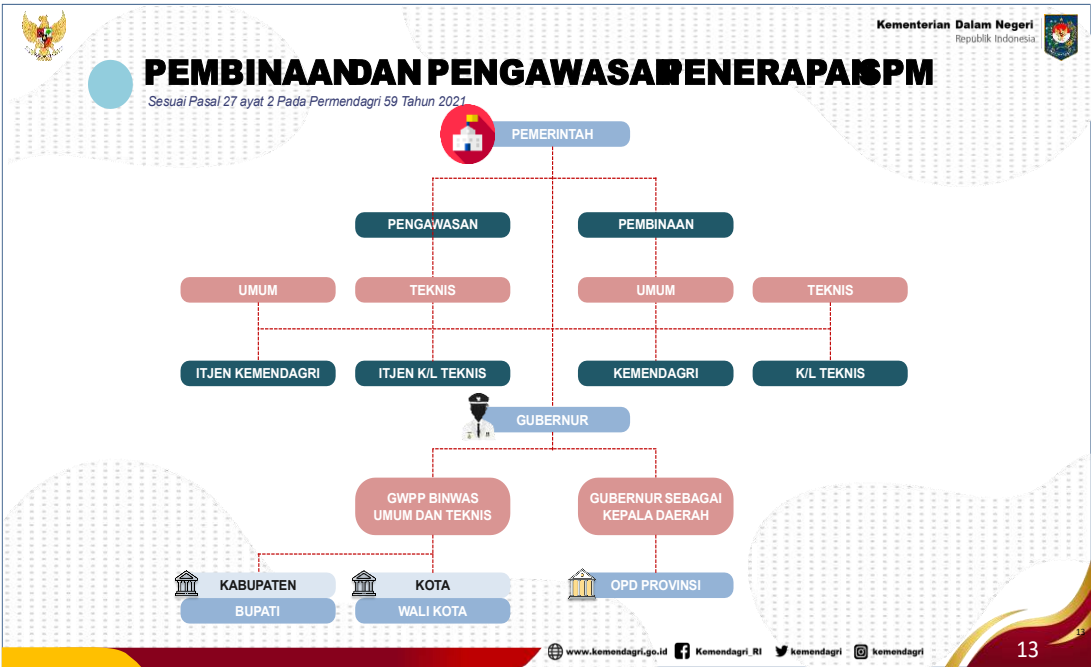
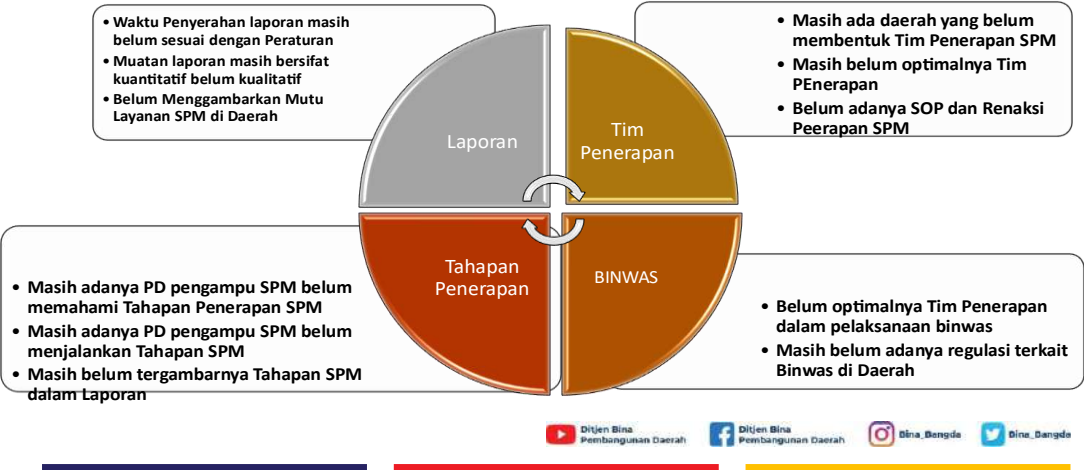
Melalui undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menegaskan bahwa (1) belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan wajib yang terkait pelayanan dasar ditegaskan dengan SPM (pasal 298 ayat 1); (2) pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (pasal 18 ayat 2 dan 3) dan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 130 (1) digunakan untuk memenuhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Tingkat capaian kinerja daerah; Pasal 144 (1) Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Ketentuan Jenis dan Mutu Pelayanan yang merupakan urusan wajib pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam konteks perencanaan penentuan strategy, program dan kegiatan menjadi penting bagi perangkat daerah untuk memiliki Rencana Aksi penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (RENAKSI SPM) yaitu dokumen rencana kerja jangka menengah tahunan dalam pencapaian penerapan SPM untuk Provinsi telah disusun tetapi Renaksi SPM untuk kabupaten belum disusun sehingga Tim Penerapan SPM Provinsi melihat adanya kebutuhan segera mendampingi Tim Penerapan SPM kabupaten untuk Menyusun dokumen tersebut. Keberadaan Renaksi SPM bertujuan menjadi alat koordinasi bagi para pihak yang berkepentingan dalam penerapan dan pencapaian SPM, sebagai pedoman dalam perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan rencana tahunan penerapan dan pencapaian SPM, sebagai pedoman pelaksanaan penerapan, pencapaian, monev dan pelaporan.

Tim Penerapan SPM provinsi membutuhkan dampingan teknis untuk menyelesaikan penulisan dokumen RENAKSI SPM Provinsi tahun 2025-2029, saat ini draft dokumen telah disusun tetapi ada kendala pada penentuan target tahunan untuk 6 bidang urusan dan pemetaan masalah, setelah itu pemahaman masih dibutuhkan peningkatan pemahaman terkait penetapan target SPM tahun berjalan terutama di penyediaan data penerima mutu dan layanan. Selain pelaksanaan adapula kewajiban bagi Tim Penerapan SPM untuk melaporkan pelaksanaan pemenuhan SPM setiap triwulan dan saat ini akhir triwulan-2 dan awal triwulan-3 melalui pelaporan akan tergambarkan progress pelaksanaan SPM.



PERMASALAHAN PENERAPAN SPM



Melalui kegiatan ini akan dilakukan pendampingan teknis bagi Tim Penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/kota dalam mengevaluasi target 2026 dan Menyusun surat Keputusan kepala daerah tentang Penetapan Target SPM tahun 2027.

A. TUJUAN

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan :

- Dampingan teknis kepada Tim Penerapan SPM tentang fitur dlm e-spm dan tatacara melakukan review kepada kabupaten/kota di e-spm;
- Dampingan teknis kepada tim penerapan SPM tentang evaluasi SK Target SPM tahun 2026;
- Dampingan teknis kepada tim Penerapan SPM penyusunan draft SK Target SPM tahun 2027;
- Mendampingi Tim Penerapan SPM Provinsi dalam memberikan dampingan teknis kepada Tim Penerapan SPM kabuapten/kota untuk finalisasi Rencana Aksi tahun 2026-2030.

B. KELUARAN

Keluaran kegiatan ini antara lain:

- Peningkatan pemahaman dan kapasitas teknis Tim Penerapan SPM dalam melakukan pelaporan pelaksanaan SPM di e-spm dan mampu lakukan review kepada kabupaten/kota ;
- Draft SK Kepala Daerah tentang Perubahan atas Penetapan Target SPM tahun 2026 tersedia ;
- Draft SK Kepala Daerah tentang Target SPM tahun 2027 tersedia;
- Final draft Renaksi SPM tahun 2026-2030 kabupaten/kota tersedia.

C. METODE

Kegiatan ini akan dilakukan dalam dua tahapan yaitu ;

- Tahapan Event Workshop selama 3 hari (offline)
 - Hari pertama update fitur baru dalam e-spm dan tatacara melakukan review yang akan dilakukan langsung di aplikasi pelaporan. Pengantar tentang regulasi terkini kemudian dilanjutkan dengan praktek.
 - Hari kedua praktek pengisian format.2 perubahan warga negara prioritas dan pengisian format.4 Perubahan Target. Kemudian dilanjutkan dengan Pengisian format.1 Pengisian Warga Negara Prioritas sebagai draft Target 2027. Kelompok akan dibagi menjadi 6 sesuai urusan dan dipandu oleh satu orang fasilitator Utama dari Bangda/TA Skala dan co-fasilitator dari Tim Penerapan SPM Provinsi.
 - Hari ketiga diawali dengan paparan hasil review draf Renaksi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan perbaikan langsung pada dokumen Renaksi. Diharapkan OPD telah menyediakan data yang dibutuhkan sehingga pada kesempatan ini tujuannya untuk klarifikasi atau konfirmasi.

D. Peserta dan Fasilitator

Narasumber, Fasilitator Utama-Co-Fasilitator dan Peserta SKALA (6 orang)

1. Bina Bangda, Kemendagri
2. Irham Putra-Bangda Kemendagri
3. Zikri Rihdo-Konsultan SPM
4. Hendri Koeswara-Konsultan SPM
5. Panitia Lokal

Peran Tim Skala (4 orang)

1. Skala Papua -Yeni Samakory (Provincial Engagement Specialist) Memastikan kesesuaian objective event dan output yang akan dicapai dalam AWP Skala Provinsi dan kualitas pelaksanaan event secara keseluruhan, back up fasilitator Utama. Memastikan Draf SK target selesai minimal sampai matriks target mutu layanan dan draf Renaksi SPM minimal Bab.1, bab.3, bab. 4 dan bab. 5. Untuk finalisasi bab.2 dan matriks setelah event.
2. Skala Papua Barat Daya- Desiderius Bir (Provincial Engagement Specialist) Kordinasi teknis pelaksanaan event dan target output SPM Provinsi dengan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota. Memastikan follow up event dengan Biro Tapem terutama untuk bab.2 Renaksi SPM dan Matriks.

3. Skala Papua Barat Daya- Kurniawan (Coordinator Provinsi) Memastikan kesesuaian pelaksanaan event harian, koordinasi pelaksanaan event mencakup narasumber, fasilitator, peserta dan tim skala, memastikan distribusi undangan dan peserta dari provinsi maupun kabupaten/kota. Bertanggung jawab terhadap Pengelolaan penyelenggaraan event secara keseluruhan.
4. Skala Papua Barat Daya -Gunawan (Administration officer) Menyiapkan logistic, mengelola panitia local, menyiapkan dokumen pembayaran, transportasi, akomodasi serta dokumentasi event meliputi absensi, foto, rekaman, banner.

Peserta Provinsi Papua Barat Daya (15 orang)

1. Bapperida Provinsi Papua Barat Daya
2. Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya
3. BPKAD Provinsi Papua Barat Daya
4. Biro Tata Pemerintahan SETDA Provinsi Papua Barat Daya
5. Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Barat Daya
6. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya
7. Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya
8. Dinas PUPR Provinsi Papua Barat Daya
9. Dinas Sosial Provinsi Papua Barat Daya
10. Satpol PP Provinsi Papua Barat Daya

Peserta Kota Sorong (9 orang)

1. Bappeda kota Sorong
2. Inspektorat Kota Sorong
3. Bagian Pemerintahan Kota Sorong
4. Dinas Kesehatan kota Sorong
5. Dinas Pendidikan kota Sorong
6. Dinas Sosial kota Sorong
7. Dinas PUPR Kota Sorong
8. Satpol PP Kota Sorong
9. Damkar, BPBD Kota Sorong

Peserta Kabupaten Sorong (9 orang)

1. Bappeda Kabupaten Sorong
2. Inspektorat Kabupaten Sorong
3. Bagian Pemerintahan Kabupaten Sorong
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong
6. Dinas Sosial Kabupaten Sorong
7. Dinas PUPR Kabupaten Sorong
8. Satpol PP Kabupaten Sorong
9. Damkar, BPBD Kabupaten Sorong

Peserta Kabupaten Sorong Selatan (9 orang)

1. Bappeda Kabupaten Sorong Selatan
2. Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan
3. Bagian Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan
6. Dinas Sosial Kabupaten Sorong Selatan
7. Dinas PU Kabupaten Sorong Selatan
8. Dinas Perkim Kabupaten Sorong Selatan
9. Satpol PP, Damkar Kabupaten Sorong Selatan

Peserta Kabupaten Maybrat (9 orang)

1. Bappeda Kabupaten Maybrat
2. Inspektorat Kabupaten Maybrat
3. Bagian Pemerintahan Kabupaten Maybrat
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Maybrat
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat
6. Dinas Sosial Kabupaten Maybrat
7. Dinas PU Kabupaten Maybrat
8. Dinas Perkim Kabupaten Maybrat
9. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Maybrat

Peserta Kabupaten Tambrau (9 orang)

- 1. Bappeda Kabupaten Tambrau
- 2. Inspektorat Kabupaten Tambrau
- 3. Bagian Pemerintahan Kabupaten Tambrau
- 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau
- 5. Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrau
- 6. Dinas Sosial Kabupaten Tambrau
- 7. Dinas PU Kabupaten Tambrau
- 8. Dinas Perkim Kabupaten Tambrau
- 9. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tambrau

Peserta Kabupaten Raja Ampat (9 orang)

- 1. Bappeda Kabupaten Raja Ampat
- 2. Inspektorat Kabupaten Raja Ampat
- 3. Bagian Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat
- 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat
- 5. Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat
- 6. Dinas Sosial Kabupaten Raja Ampat
- 7. Dinas PU Kabupaten Raja Ampat
- 8. Dinas Perkim Kabupaten Raja Ampat
- 9. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Raja Ampat

Total peserta Pemda Provinsi & Kab/Kota: **69 orang**

E. **WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

Kegiatan akan berlangsung tanggal 1-3 September 2026 di Hotel Rylich Panorama Sorong, Papua Barat Daya.

Agenda Kegiatan:

No	Waktu/ WIT	Materi	Keterangan
Selasa,01 September 2026			
2	08:00-10:00	- Registrasi Peserta - Pembukaan	Pantia dan Fasiltiator
	10:00-11:00	Kebijakan Pelaksanaan SPM tahun 2026	Bina Bangda
	11:00-12:00	Update fitur dalam e-spm dan tanya jawab	Bina Bangda
	12:00-13:00	Ishoma	Panitia
	13:00-14:00	Praktek review dalam e-spm - Review Inspektorat - Review Provinsi terhadap Kab/kota	Fasilitator Utama dan co-fasilitator
	14:00-15:00	Praktek pengisian format 4 tahapan -Pembagian kelompok	Fasilitator Utama dan co-fasilitator
	15:00-15:15	Coffee break	
	15:15-17:00	Lanjut Praktek Pengisian format 4 tahapan Pembagian kelompok	Fasilitator Utama dan co-fasilitator
Rabu,02 September 2026			

3	09:00- 12:00	Praktek Pengisian Format.2 dan Format.4 • Kelompok. 1 Urusan Kesehatan dan Pendidikan • Kelompok.2 Urusan Sosial dan Trantib • Kelompok.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Fasilitator Utama dan co-fasilitator
	12:00-13:00	Ishoma	Panitia
	13:00-14:00	Lanjut Praktek Pengisian Format.1 • Kelompok. 1 Urusan Kesehatan dan Pendidikan • Kelompok.2 Urusan Sosial dan Trantib • Kelompok.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Fasilitator Utama dan co-fasilitator
	14:00-15;00	Lanjut Praktek Pengisian Format.1 • Kelompok. 1 Urusan Kesehatan dan Pendidikan • Kelompok.2 Urusan Sosial dan Trantib • Kelompok.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Fasilitator Utama dan co-fasilitator
	15:00-15:15	Coffee break	Panitia
	15:15-17:00	• Penyusunan draft SK Kepala Daerah tentang Perubahan Penetapan Target 2026 • Penyusunan draft SK Kepala Daertah tentang Penetapan Target 2027	Fasilitator Utama dan co-fasilitator
Kamis,03 September 2026			
4	09:00-10:00	• Pengantar Penyusunan Renaksi SPM • Penyusunan Bab.1	Fasilitator Utama dan co-fasilitator
	11:00-11:40	Penyusunan Bab.2	Fasilitator Utama dan co-fasilitator
	11:30-13:30	Ishoma	Panitia
	13:30-15:00	Penyusunan Bab.3	Fasilitator Utama dan co-fasilitator
	15:00-16:00	Penyusunan Bab. 4 & 5	Fasilitator Utama dan co-fasilitator
	16:00-17:00	Finalisasi Dokumen Renaksi Penutupan	Fasilitator Utama dan co-fasilitator Panitia

F. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dibiayai oleh Skala yang meliputi travel Narasumber/Fasilitator/tim skala, Honorarium, sewa mobil, akomodasi, perdiem dan meeting paket pertemuan.

-----end of TOR-----